

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses penyampaian informasi dan sosialisasi pemilihan serentak 2020 melalui laman resmi KPU DIY memang dapat terjadi akibat adanya proses *new media* yang berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan, laman resmi KPU DIY tentunya sangat lekat atau identik dengan proses *new media*. Hal tersebut juga dikarenakan, adanya Standar Operasional kepiluan yang tentunya sangat berguna agar bisa menghasilkan produk berita dan sosialisasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif, yang telah dilaksanakan tentang proses penyampaian informasi dan sosialisasi pemilihan serentak 2020 melalui laman resmi KPU DIY dalam konteks *new media* dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola Pemilihan Kepala daerah dimasa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dengan penyesuaian-penyesuaian dimasa pandemi.
2. Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi sudah sangat efektif dengan meluaskan kegiatan sosialisasi kepada seluruh basis pemilih dan menggunakan berbagai media dengan mengutamakan platform website/laman diy.kpu. Dalam proses penyampaian informasi dan sosialisasi pemilihan serentak 2020, harus melalui Standar Operasional kepiluan. Standar Operasional ini bertujuan agar kinerja dari divisi yang mengurus informasi dan sosialisasi serta admin dari laman resmi KPU DIY tersebut dapat bekerja dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan produk informasi atau sosialisasi yang baik pula. Dengan diaturnya Standar

Operasional ini, diharapkan kegiatan pengelolaan website dapat dilaksanakan oleh para pelaku dengan benar, teratur, terukur, efektif, efisien. Sehingga capaian yang menjadi ekspektasi sebuah website akan terpenuhi. Penerapan Standar Operasional pengelolaan website terletak pada para pelaku di dalamnya yang terdiri dari berbagai peran yang saling terkait satu sama lain. Adapun pencapaian dari hasil terapan Standar Operasional ini sangat ditentukan oleh kualitas para pelaku pengelola website dalam perannya.

3. Laman resmi KPU Daerah memiliki *server* yang sama dengan laman resmi yang dimiliki oleh KPU pusat di Jakarta. Oleh karena itu, jika ada gangguan seperti *error* atau *traffic yang padat* yang bisa saja menyebabkan proses publikasi sebuah informasi atau sosialisasi mengalami hambatan tentunya akan berkoordinasi dengan staff TI yang ada di KPU Pusat di Jakarta. Begitu juga dengan perubahan tampilan tentunya mengikuti permintaan dari *user* atau pengguna yang ada. Laman resmi KPU DIY memiliki kekurangan salah satunya karena laman resmi KPU DIY ini mengikuti *server* dari KPU pusat yang ada di Jakarta, maka jika *server* dari pusat mengalami *down* atau sedang pemeliharaan jaringan, maka laman resmi KPU DIY juga mengalami hal yang sama.
4. Laman resmi KPU DIY juga berintegrasi dengan media massa dan media sosial tentunya bertujuan agar informasi dan sosialisasi melalui laman resmi KPU DIY tersebut bisa mencapai masyarakat yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas, adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan Standar Operasional yang ada ini diharapkan tidak mengalami perubahan lagi agar kinerja dari divisi dan admin yang terkait dengan proses penyampaian informasi dan sosialisasi melalui laman resmi bisa bekerja lebih baik.
2. Melihat beban kerja tim, maka penting untuk dipertimbangkan oleh Penyelenggara Pemilu bahwa tim Media Center tidak dibebankan dengan aktivitas lain selain tupoksi ke-Media Center-an sebagaimana yang dijelaskan di atas. Supaya kinerja tim dan output yang dihasilkan bisa lebih baik, yang berujung pada kinerja sosialisasi dan diseminasi informasi Penyelenggara Pemilu yang baik pula.
3. Untuk laman resmi KPU DIY itu sendiri diharapkan mempunyai *server* atau jaringan tersendiri. Karena jika mempunyai jaringan sendiri tentu masyarakat DIY lebih mudah mendapatkan informasi maupun sosialisasi.
4. Di era industri 4.0 ini; selain Website, Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube Channel dapat menjadi alternatif sarana program komunikasi KPU sehingga pemilih semakin memahami tujuan serta program yang bermanfaat untuk masyarakat. Selama masa *social distance covid* ini, sudah selayaknya program-program virtual harus terus digalakkan dan dibuat secara terencana sehingga ketika semua kembali normal nantinya, KPU tinggal melanjutkan program offline dengan tetap menyeimbangkan program online yang sudah menjadi bagian dari era digital saat ini sehingga akan tercipta satu kesatuan program branding KPU yang kuat.